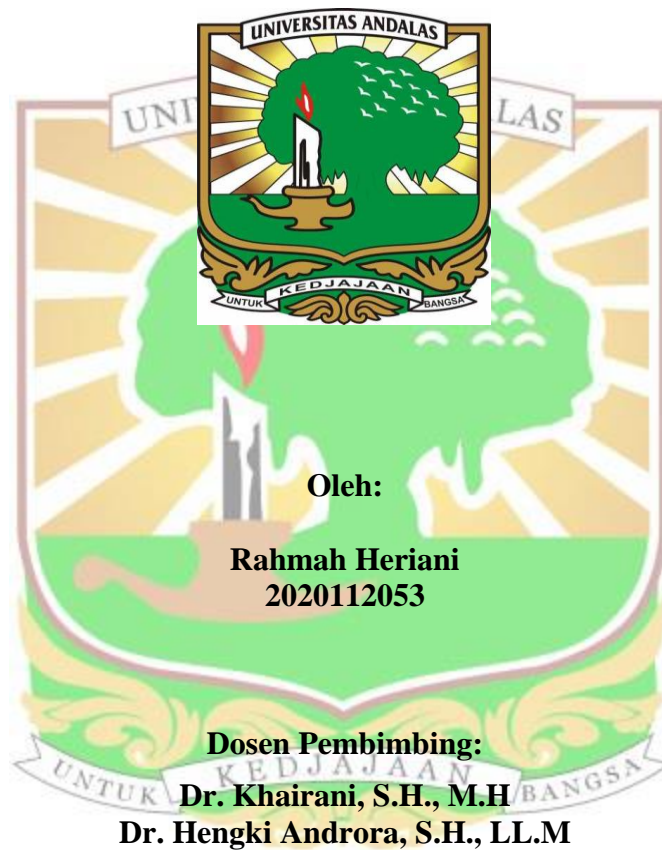


**KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN PERATURAN NAGARI DI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT**

**TESIS**

*Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum*



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2023**

# **KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN PERATURAN NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**(Rahmah Heriani, 2020112053, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 126 Halaman, 2023)**

## **ABSTRAK**

Penegakan hukum dilaksanakan untuk menjamin ketentuan yang terdapat dalam hukum tertulis dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh hukum tersebut. Penegakan peraturan desa atau nagari yang berbeda, dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Badan Musyawarah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Perlindungan Masyarakat, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan Parik Paga, akibatnya muncul masalah lembaga atau organ yang berwenang menegakkan peraturan nagari. Dalam kenyataannya pelaksanaan dalam menegakkan peraturan nagari yang terjadi dalam nagari di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan oleh Perangkat Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Kepolisian Sektor, Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Tentu saja ini menimbulkan isu hukum yang menarik untuk diteliti. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Lembaga atau organ manakah yang seharusnya diberi kewenangan dalam menegakkan Peraturan Nagari; (2) Bagaimana pengaturan kewenangan penegakan Peraturan Nagari dalam peraturan perundang-undangan; (3) Bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang menegakkan peraturan nagari, jika dilihat kembali Trias Politica, pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Penegakan Peraturan nagari harus ada lembaga khusus bertujuan untuk menghindari apabila ada lembaga yang membuat undang-undang juga ikut menegakkan peraturan nagari tersebut maka akan terjadi penguasa atas aturan yang dibuat dan berkuasa juga dalam melanjutkan penindakan atas pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Pengaturan penegakan peraturan nagari harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada kenyataannya berbeda dari norma diatas sampai norma yang dibawah. Dalam penelitian ini adanya perbedaan penegakan hukum menurut teori Friedman mengenai penegakan peraturan nagari adanya struktur atau lembaga-lembaga penegakan hukum yang berbeda di setiap peraturannya, ini membuat keraguan bagi penegak hukum dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Peraturan Nagari, Wewenang.

# **AUTHORITY IN ENFORCEMENT OF NAGARI REGULATIONS IN THE DISTRICT WEST PASAMAN**

**(Rahmah Heriani, 2020112053, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas  
University, 126 Pages, 2023)**

## **ABSTRACT**

Law enforcement is carried out to ensure that the provisions contained in written law can be carried out in accordance with the objectives desired by the law. Enforcement of different village or nagari regulations, starting with Law Number 6 of 2014 concerning Villages mentioning the Deliberative Council, Minister of Home Affairs Regulation Number 26 of 2020 concerning Implementation of Public Order and Community Peace and Community Protection as a Community Protection Unit, West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari mentions Parik Paga, as a result a problem arises with the institution or organ authorized to enforce nagari regulations. In reality the implementation in enforcing nagari regulations that occurred in the nagari in West Pasaman Regency was carried out by Nagari Officials, Nagari Customary Density, Sector Police, Village Superintendent and Bhayangkara Supervisor of Community Security and Order. Of course this raises interesting legal issues to be studied. The problems in this study are (1) Which institution or organ should be given the authority to enforce Nagari Regulations; (2) How is the authority to enforce Nagari Regulations in statutory regulations; (3) How is the implementation of the enforcement of Nagari Regulations in West Pasaman Regency. This study uses empirical juridical research methods, namely field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Based on this research, it can be seen that the institution authorized to enforce nagari regulations, if we look back at Trias Politica, the separation of executive, legislative and judicial powers. Enforcement of Nagari Regulations must have a special institution with the aim of avoiding if there is an institution that makes laws that also enforces these Nagari regulations, then there will be a ruler over the rules made and has the power to continue enforcing the implementation of law enforcement itself. Arrangements for enforcement of nagari regulations must be in accordance with the hierarchy of statutory regulations. However, in reality it is different from the norm above to the norm below. In this study, there are differences in law enforcement according to Friedman's theory regarding the enforcement of nagari regulations, the existence of different law enforcement structures or institutions in each regulation, this raises doubts for law enforcers and the community.

**Keywords:** Law Enforcement, Nagari Regulations, Authority.